

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 telah memberikan dampak positif terhadap operasional dan manajemen Pelabuhan Feri Kuala Kapuas. Hal ini terlihat dari penerapan SOP, pemeriksaan kelayakan kapal, pengaturan penumpang dan kendaraan, penyediaan fasilitas keselamatan, pelatihan awak kapal, serta pelaksanaan prosedur tanggap darurat. Berdasarkan teori efektivitas hukum, peraturan ini tergolong cukup efektif karena sebagian besar ketentuannya telah diterapkan dan berkontribusi pada peningkatan keamanan serta keselamatan pelayaran. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, administrasi, serta rendahnya kesadaran sebagian pengguna jasa terhadap keselamatan pelayaran.
2. Aspek yang mendukung penerapan peraturan tersebut antara lain adanya landasan hukum yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. penerapan SOP, tersedianya fasilitas keselamatan dasar, pengawasan rutin, serta koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dan BPTD. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan, kerusakan peralatan keselamatan, keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan pelayaran, konflik kewenangan, keterbatasan anggaran, serta karakteristik wilayah

sungai yang berbeda dengan pelabuhan laut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi pengawasan, penguatan koordinasi antar instansi, dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan sistem keamanan dan keselamatan pelayaran yang lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran Kepada pemerintah dan instansi terkait terus meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta dukungan sarana dan prasarana guna menunjang implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2021 secara optimal di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas. Pengelola pelabuhan dan operator kapal juga perlu memperkuat penerapan prosedur operasional standar (SOP), melakukan pemeriksaan fasilitas keselamatan secara berkala, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa transportasi penyeberangan.

Selain itu, Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diwujudkan melalui pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan di bidang keselamatan pelayaran bagi awak kapal maupun petugas yang bertugas. pelabuhan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mendukung terciptanya sistem keamanan yang lebih efektif. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi penyeberangan juga diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam mematuhi aturan keselamatan pelayaran sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, dan masyarakat, diharapkan penerapan Efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan perlu terus ditingkatkan agar mampu mendukung keamanan operasional secara optimal. serta mampu mewujudkan pelayanan transportasi penyeberangan yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Pelabuhan Feri Kuala Kapuas.